ALBERTINA HO, GAYUS TAMBUNAN DAN PPN PASAL 16D**Imam Muhasan****Politeknik Keuangan Negara STAN**imam.muhasan@pknstan.ac.id**INFORMASI ARTIKEL**

Diterima Pertama
[16052020]

Dinyatakan Diterima
[17072020]

KATA KUNCI:

Hukum Perpajakan, PPN Pasal 16D, Albertina Ho,
Gayus Tambunan

ABSTRAK

Ibu Albertina Ho merupakan Hakim Ketua yang menyidangkan perkara korupsi, dengan terdakwa Sdr. Gayus Tambunan pada tahun 2010-2011 silam. Dalam perkara tersebut, melalui Putusan Nomor 1195/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel yang dibacakan pada tanggal 19 Januari 2011, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan sanksi pidana lainnya. Dalam perkara tersebut, isu perpajakan yang menjadi pokok sengketa yang akhirnya dianggap telah merugikan keuangan negara (tindak pidana korupsi), adalah terkait pengenaan PPN Pasal 16D. Bersama dengan anggota Tim Peneliti Keberatan lainnya, Sdr. Gayus Tambunan 'mengabulkan' permohonan keberatan yang diajukan oleh PT SAT, dengan menyatakan bahwa atas pengalihan aktiva bekas yang dilakukan oleh PT SAT tidak terutang PPN Pasal 16D. Hal mana menegaskan pendapat Tim Pemeriksa Pajak Kanwil DJP Jawa Bagian Timur, yang menyatakan terutang PPN pasal 16D. Penelitian ini menganalisis validitas pendapat Tim Peneliti Keberatan Pajak terkait pengenaan PPN Pasal 16D dalam perkara *a quo*. Dari penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa pendapat Tim Peneliti Keberatan tidaklah tepat (salah). Namun demikian, mengenai apakah kesalahan yang dilakukan oleh Tim Peneliti Keberatan tersebut merupakan bentuk kesalahan administratif (maladministrasi) ataupun sudah masuk dalam kualifikasi tindak pidana (korupsi), bukan merupakan objek pembahasan dalam penelitian ini.

1. PENDAHULUAN

Sejak nama Ibu Albertina Ho disebut oleh Presiden Joko Widodo sebagai salah satu calon anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga pengangkatan Beliau (bersama 4 tokoh lainnya) melalui Keputusan Presiden Nomor 140/P Tahun 2019, hampir seluruh media massa nasional (*online* dan *offline*) ramai mengangkat berita tentang Ibu Albertina Ho, dikaitkan dengan sosok Gayus H.P. Tambunan (Gayus Tambunan. Jika kita *flashback* pada peristiwa sekitar tahun 2010-2011, kita akan teringat pada persidangan perkara korupsi dengan terdakwa Sdr. Gayus Tambunan, dimana bertindak selaku Hakim Ketua yang menyidangkan perkara tersebut adalah Ibu Albertina Ho. Dalam perkara tersebut, melalui Putusan Nomor 1195/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel yang dibacakan pada tanggal 19 Januari 2011, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan sanksi pidana lainnya.

Namun demikian, penelitian ini tidaklah membahas tentang biografi dari Ibu Albertina Ho, yang menurut pandangan Peneliti merupakan sosok Srikandi Hukum yang sangat hebat, ataupun tentang biografi Sdr. Gayus Tambunan, mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Penelitian ini tidak pula menganalisis mengenai tepat atau tidaknya putusan majelis hakim dalam perkara *a quo*. Pokok bahasan dalam penelitian ini adalah tentang salah satu obyek Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu Pasal 16D UU PPN (dalam penelitian ini disebut PPN Pasal 16D), yang merupakan isu utama dalam 'perkara' Sdr. Gayus Tambunan yang 'disidangkan' oleh Ibu Albertina Ho.

PPN Pasal 16D menjadi isu utama dalam persidangan pada saat itu, mengingat objek pajak tersebut merupakan pokok sengketa yang diajukan keberatan oleh wajib pajak, yakni PT Surya Alam Tunggal (PT SAT). Berbeda dengan Tim Pemeriksa Pajak Kanwil DJP Jawa Bagian Timur yang Surat Ketetapan nya diajukan keberatan, Tim Peneliti Keberatan Direktorat Keberatan dan Banding DJP (dimana Sdr. Gayus Tambunan termasuk di dalamnya) berpendapat bahwa atas penyerahan dalam perkara yang disengketakan, TIDAK terutang PPN Pasal 16D. Sebuah pendapat hukum yang memiliki konsekuensi hukum berupa pengembalian (restitusi) pajak senilai Rp 570.952.000,- kepada PT SAT.

Menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam dakwaannya, perbuatan yang dilakukan oleh Tim Peneliti Keberatan yang menyebabkan terbitnya restitusi pajak tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara. Oleh karenanya, terhadap Sdr. Gayus Tambunan beserta anggota Tim Peneliti Keberatan lainnya (disidangkan secara terpisah),

didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sebuah dakwaan yang akhirnya 'diamini' oleh Majelis Hakim, dalam amar putusannya.

Adapun perbedaan pendapat antara Tim Pemeriksa Pajak dan Tim Peneliti Keberatan atas objek PPN Pasal 16D dalam perkara PT SAT, terletak pada status Pajak Masukan pada saat perolehan aktiva (yang kemudian dialihkan oleh PT SAT), apakah dapat dikreditkan atau tidak. Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 16D UU PPN Nomor Nomor 11 Tahun 1994, Tim Peneliti Keberatan berpendapat bahwa atas pengalihan aktiva tetap yang dilakukan oleh PT SAT tidak terutang PPN Pasal 16D karena status Pajak Masukan pada saat perolehan aktiva yang dialihkan tersebut, tidak dapat dikreditkan. Hal mana tidak menjadi pertimbangan Tim Pemeriksa Pajak Kanwil DJP Jawa Bagian Timur dalam menetapkan pajak terutang.

Yang 'menarik' dari isu penentuan status Pajak Masukan oleh Tim Peneliti Keberatan hingga akhirnya dianggap 'salah' oleh Aparat Penegak Hukum, adalah bahwa:

1. saat terjadinya perolehan aktiva dimaksud berada dalam rentang waktu antara tahun 1994 (saat pembuatan PPJB) hingga tahun 1995 (saat pembuatan AJB), dimana antara tahun 1994 dan 1995 berlaku dua 'rezim' UU PPN yang berbeda. Tahun 1994 masih berlaku Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang belum mengekankan PPN Pasal 16D, dan UU Nomor 11 Tahun 1994 yang mulai mengenakan PPN Pasal 16D (UU ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 1995).
2. jenis aktiva tetap yang diperoleh, kemudian dialihkan oleh PT SAT tersebut merupakan benda tidak bergerak (berupa tanah dan bangunan), dimana secara keperdataan untuk proses pengalihan atau perolehannya tidak semata-mata hanya melalui penyerahan secara fisik atau nyata (*feitelijke levering*) melainkan juga harus disertai dengan penyerahan secara yuridis (*juridische levering*).

Sehubungan dengan hal tersebut, yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah: apakah penentuan saat perolehan aktiva tetap berupa tanah dan bangunan dengan mendasarkan pada saat dibuatnya PPJB, yakni tahun 1994 (sementara AJB baru dibuat pada awal tahun 1995) oleh Tim Peneliti Keberatan dalam perkara *a quo*, merupakan pendapat yang tepat?

2. PEMBAHASAN

2.1 Gayus Tambunan, Albertina Ho, dan PT SAT

Dalam kurun waktu 2010 hingga 2011, masyarakat Indonesia 'dihebohkan' dengan pemberitaan di hampir seluruh media massa nasional tentang kepemilikan 'rekening gendut' oleh Sdr. Gayus Tambunan, yang diduga diperoleh secara melawan hukum (*illicit enrichment*), karena dinilai tidak sesuai dengan profil penghasilan yang bersangkutan selaku PNS dengan Pangkat III.a pada saat itu. Secara normatif, kepemilikan 'rekening gendut' bukanlah merupakan tindak pidana (delik), baik menurut KUHP, Undan-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun peraturan perundang-undangan pidana khusus lainnya.

Demikian pula, menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) maupun UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Untuk dapat didakwa dengan tindak pidana pencucian uang, terlebih dahulu harus dapat ditemukan (tidak harus dibuktikan) adanya Tindak Pidana Asal (*Predicate Crime*), sebagai Pintu Masuk (*Prima Facie*). Oleh karenanya, dalam perkara Sdr. Gayus Tambunan, harus pula ditemukan *Predicate Crime* atas kepemilikan 'rekening gendut' dimaksud.

Singkat cerita, Sdr. Gayus Tambunan menjadi Terdakwa dalam suatu persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan bertindak sebagai Hakim Ketua adalah Ibu Albertina Ho. Secara ringkas, Gayus Tambunan secara bersama-sama dengan anggota lainnya "Tim Peneliti Keberatan" Direktorat Keberatan dan Banding DJP didakwa telah melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam 'penerbitan' surat keputusan keberatan atas nama Wajib Pajak PT Surya Alam Tunggal (PT SAT).

Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa keputusan Tim Peneliti Keberatan (termasuk Sdr. Gayus Tambunan) yang 'mengabulkan' permohonan keberatan PT SAT dan oleh karenanya Negara harus mengembalikan kelebihan pembayaran (restitusi) pajak kepada PT SAT senilai Rp 570.952.000,- tersebut merupakan tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana dimaksud Pasal 3 UU Tipikor. Melalui Putusan Nomor 1195/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel yang dibacakan pada tanggal 19 Januari 2011, majelis hakim yang diketuai oleh Ibu Albertina Ho menjatuhkan pidana penjara selama 7 tahun dan sanksi pidana lainnya terhadap Sdr. Gayus Tambunan.

2.2 PPN Pasal 16D dan Keberatan PT SAT

Berdasarkan Pasal 16D UU PPN Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, atas penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, terutang PPN. Masyarakat umum seringkali menyebut objek pajak ini sebagai PPN atas penyerahan aktiva bekas. Sesungguhnya PPN Pasal 16D ini merupakan jenis objek pajak baru yang dikenakan melalui UU PPN Nomor 11 Tahun 1994 (berlaku mulai tanggal 1 Januari 1995). Dengan kata lain, sebelum tahun 1995 (dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983), ketentuan mengenai PPN Pasal 16D atas pengalihan aktiva bekas ini belum atau tidak ada.

Mengenai PPN Pasal 16D yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan keberatan PT SAT, berawal dari pemeriksaan yang dilakukan Tim Pemeriksa Pajak Kanwil DJP Jawa Bagian Timur terhadap PT SAT untuk Tahun Pajak 2004. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, Kepala KPP Sidoarjo telah menerbitkan SKPKB, termasuk SKPKB PPN yang merupakan pengenaan PPN Pasal 16D atas pengalihan aktiva bekas berupa Tanah, Bangunan dan Mesin (dalam 1 paket) yang berlokasi di Banyuwangi, oleh PT SAT kepada PT Surya Adikumala Abadi (PT SAA).

Atas SKPKB tersebut, PT SAT mengajukan permohonan Keberatan ke Direktorat Keberatan dan Banding melalui Surat Nomor Sek.125/Pjk.SAT/III/2007. Singkat cerita, Direktur Keberatan dan Banding menerbitkan Surat Tugas kepada Tim Peneliti Keberatan, yang di dalamnya termasuk Sdr. Gayus Tambunan, untuk melakukan penelitian terhadap permohonan keberatan yang diajukan PT SAT tersebut. Dengan mendasarkan pada hasil Penelitian yang dilakukan Tim Peneliti Keberatan, pada tanggal 22 Oktober 2007 Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Nomor KEP-757/PJ.07/2007, yang pada intinya 'mengabulkan' permohonan keberatan yang diajukan PT SAT, yang ditindaklanjuti dengan penerbitan SKPKP dan SKPIB oleh Kepala KPP Madya Sidoarjo.

2.3 Analisis atas Pendapat Tim Peneliti Keberatan terkait PPN Pasal 16D

Secara garis besar, argumentasi atau pertimbangan yang digunakan oleh Tim Peneliti Keberatan dalam 'mengabulkan' permohonan keberatan yang diajukan PT SAT terkait atas PPN Pasal 16D adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan Pasal 16D UU PPN Nomor 11 Tahun 1994, pengalihan aktiva bekas 'hanya' terutang PPN jika status pajak masukan pada saat perolehannya dahulu, dapat dikreditkan. Adapun ketentuan mengenai Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan, diatur dalam Pasal 9 ayat (8) UU PPN.

- Aktiva bekas dimaksud, menurut pendapat Tim Peneliti, diperoleh PT SAT dari PT SAA pada tanggal 31 Desember 1994, dimana UU PPN Nomor 11 Tahun 1994 yang mengatur tentang PPN Pasal 16D belum berlaku (baru berlaku mulai 1 Januari 1995).
- Pendapat Tim Peneliti Keberatan ini didasarkan pada adanya Akta Ikatan Jual Beli dan Pengoperan (semacam PPJB) Nomor 160 tanggal 31 Desember 1994.

Secara normatif, sejak reformasi perpajakan tahun 1983, ketentuan tentang PPN diatur dengan UU PPN Nomor 8 Tahun 1983, UU PPN Nomor 11 Tahun 1994, UU PPN Nomor 18 Tahun 2000 dan UU PPN Nomor 42 Tahun 2009. Adapun pengaturan mengenai PPN Pasal 16D dalam keempat UU PPN di atas, adalah sebagai berikut:

- UU PPN Nomor 8 Tahun 1983
Dalam undang-undang ini belum diatur mengenai obyek pajak pasal 16D. Dengan kata lain, atas pengalihan “aktiva bekas” oleh PKP, tidak terutang PPN.
- UU PPN Nomor 11 Tahun 1994
Dalam UU yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1995 inilah, ketentuan pasal 16D dimunculkan. Dengan demikian, atas pengalihan “aktiva bekas” oleh PKP, terutang PPN, sepanjang Pajak Masukan pada saat perolehannya, dapat dikreditkan.
- UU PPN Nomor 18 Tahun 2000
Dalam UU ini, tidak terdapat perubahan atas ketentuan Pasal 16D. Dengan kata lain, ketentuan PPN Pasal 16D sebagaimana diatur dalam UU PPN Nomor 11 Tahun 1995 tetap berlaku.
- UU PPN Nomor 42 Tahun 2009
Dalam UU ini, terdapat perubahan redaksional pengaturan Pasal 16D dari UU Nomor 11 Tahun 1995, yang pada intinya “mempersempit” kriteria Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagai prasyarat tidak terutangnya PPN atas pengalihan “aktiva bekas”. Perubahan ini dapat dilihat dari:
 - Hilangnya kata ‘yang dibayar’ dalam frasa ‘PPN yang dibayar’, dan
 - Penambahan frasa “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c”

Sesungguhnya perubahan pengaturan PPN 16D dalam UU Nomor 42 Tahun 2009 di atas, tidak terlepas dari masih banyaknya perbedaan pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan “sepanjang Pajak Masukan atas perolehannya dapat dikreditkan”, baik di kalangan internal pegawai DJP maupun kalangan masyarakat Wajib Pajak. Oleh karenanya, tidak mengherankan jika Tim Peneliti Keberatan membuat kesimpulan sebagaimana diuraikan di atas. Dengan penormaan baru atas PPN 16D melalui UU PPN Nomor

42 Tahun 2009 di atas, diharapkan kejadian serupa tidak akan terulang kembali.

Kembali pada argumentasi Tim Peneliti Keberatan yang menyatakan bahwa Aktiva Bekas diperoleh PT SAT dari PT SAA pada tanggal 31 Desember 1994 dengan berdasarkan pada Akta Ikatan Jual Beli dan Pengoperan (PPJB), merupakan pendapat yang tidak tepat. Pada kenyataannya, aktiva bekas dimaksud masih dalam penguasaan BRI Cabang Surabaya, sebagai jaminan atas pinjaman yang dilakukan PT SAA, yang oleh karenanya pengalihan **secara yuridis** belum terlaksana dalam tahun 1994 (baru terlaksana pada bulan Juni 1995).

Secara keperdataan, perlu dibedakan saat terjadinya penyerahan (*levering*) antara baenda bergerak dan benda tidak bergerak. Untuk benda bergerak, berdasarkan Pasal 612 KUHPerdara, penyerahan dapat dilakukan melalui penyerahan secara nyata dari tangan ke tangan (*feitelijke levering*), sehingga dengan sendirinya penyerahan nyata tersebut adalah sekaligus penyerahan yuridis (*juridische levering*). Sementara untuk benda tidak bergerak, berdasarkan Pasal 616 KUHPerdara, penyerahan dilakukan melalui pengumuman akta yang bersangkutan dengan cara seperti ditentukan dalam Pasal 620 KUHPer antara lain membukukannya dalam register (sertifikat).

Akta Ikatan Jual Beli dan Pengoperan yang dibuat antara PT SAA dan PT SAT pada tanggal 31 Desember 1994, bukanlah merupakan tanda atau kondisi yang mendandakan telah terjadinya perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh PT SAT. Kedudukan Akta Ikatan Jual Beli tersebut baru sebatas kesepakatan perjanjian antara PT SAA dan PT SAT untuk melakukan jual-beli (PPJB). Adapun saat pengalihan atau perolehannya adalah pada saat dibuat atau ditandatanganinya Akta Jual Beli (AJB), pada awal tahun 1995.

Selain itu, dengan berdasarkan pada Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPN BM sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 1994, saat penyerahan PPN diatur sebagai berikut:

- 1) Terutangnya pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya merupakan barang bergerak, terjadi pada saat Barang Kena Pajak tersebut diserahkan secara langsung kepada pihak pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli, atau pada saat Barang Kena Pajak diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan.
- 2) Terutangnya pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang menurut sifat atau

hukumnya merupakan barang tidak bergerak, terjadi pada saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai Barang Kena Pajak tersebut, baik secara hukum atau secara nyata, kepada pihak pembeli .

Salah satu ahli dibidang Pajak Pertambahan Nilai, Alm. Bapak Untung Sukardji, mencontohkan penyerahan berdasarkan kenyataan adalah 'penyerahan kunci' kepada pembeli rumah atau bangunan. Demikian pula, berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1995 (Ketentuan Peralihan), diatur bahwa: *atas penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang diperoleh sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 11 tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.*

3. PENUTUP

3.1 Simpulan

Pendapat Tim Peneliti Keberatan yang menyatakan bahwa atas suatu pengalihan aktiva bekas, hanya terutang PPN Pasal 16D jika pada saat perolehan aktiva tersebut status Pajak Masukannya dapat dikreditkan, merupakan pendapat yang tepat. Namun demikian dalam perkara keberatan PT SAT, pendapat Tim Peneliti Keberatan yang menyatakan bahwa atas pengalihan aktiva bekas oleh PT SAT tidak terutang PPN pasal 16D dengan pertimbangan bahwa saat perolehan aktiva berupa tanah dan bangunan pajak masukannya tidak dapat dikreditkan karena terjadi pada tahun 1994 dengan mendasarkan pada pembuatan PPJB (Desember 1994), padahal AJB dibuat pada tahun 1995, merupakan pendapat yang tidak tepat (salah). Secara keperdataan, PPJB bukanlah tanda telah terjadinya pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Adapun mengenai apakah kesalahan yang dilakukan oleh Tim Peneliti Keberatan tersebut merupakan bentuk kesalahan administratif (maladministrasi) ataupun sudah masuk dalam kualifikasi tindak pidana (korupsi), bukanlah merupakan objek pembahasan dalam penelitian ini. Dengan mendasarkan pada asas hukum *Res Judicata Pro Veritate Habetur*, maka putusan pengadilan haruslah dianggap benar. Terlebih saat ini Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 1195/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel, serta putusan-putusan lain dengan terdakwa anggota Tim Peneliti Keberatan lainnya yang disidangkan secara terpisah, telah berkekuatan tetap (*inkracht van gewijsde*).

3.2 Saran

Salah satu penyebab terjadinya kesalahan Tim Peneliti Keberatan dalam menentukan terutang-tidaknya PPN Pasal 16D dalam perkara *a quo*, bisa jadi karena ketidaktahuan mengenai saat terjadinya

pengalihan hak suatu benda secara keperdataan (berdasarkan hukum perdata). Oleh karenanya, perlu kiranya dilakukan pembekalan terhadap para pegawai DJP mengenai aspek-aspek hukum (termasuk hukum perdata) dalam pelaksanaan tugas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Untung Sukardji. *Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Edisi Revisi 2015*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Frieda Husni Hasbullah. *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan*. Jakarta: Ind-Hill-Co, 2005.
- Herlien Budiono. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di bidang Kenotariatan (Buku Kesatu), Cet. Ke-4*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.
- Sunindhia, Nunik Widiyanti. *Pembaharuan Hukum Agraria*. Jakarta: Bina ksara. 1988.
- Surini Ahlan Syarif. *Intisari Hukum Benda*. Jakarta: Galia Indonesia, 1984.
- Urip Santoso. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana, 2012.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Atau Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah Dengan undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPN BM sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 1994.

Putusan Pengadilan:

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1195/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel, dengan Terdakwa: Gayus HP. Tambunan (Tingkat Pertama)
- Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 06/PID/TPK/2011/PT.DKI, dengan Terdakwa: Gayus HP Tambunan (Tingkat Banding)
- Putusan MA Nomor: 1198 K/PID.SUS/2011, dengan Terdakwa: Gayus HP Tambunan (Tingkat Kasasi)
- Putusan MA Nomor: 38 PK/Pid.Sus/2013, dengan Terdakwa: Gayus HP Tambunan (Tingkat Peninjauan Kembali)
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1289/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel, dengan Terdakwa: Maruli Pandapotan Manurung (Tingkat Pertama)